

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN
MASYARAKAT MANDIRI BERDAYA SAING DAN
INOVATIF (GEMA MADANI SIMPATI) OLEH TIM
PELAKSANA KEGIATAN DI KELURAHAN SUKALAKSANA
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA**

Resi Ersita

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: resiersita@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya sejauh ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa permasalahan dalam hal implementasi program GEMA MADANI SIMPATI oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana antara lain kurang maksimalnya sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan sadar inflasi, TPK kurang mampu menyediakan sarana dan prasarana pada kegiatan sadar inflasi, kurang maksimalnya pengawasan oleh TPK dalam kegiatan sadar inflasi. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari studi literatur dan dokumentasi, studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi, serta triangulasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (orang). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana khususnya pada bidang ekonomi yaitu kegiatan sadar inflasi diketahui belum berjalan dengan maksimal. Masih terdapat dimensi yang belum sesuai dengan pelaksanaannya seperti kurang kompetennya masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan TPK, terbatasnya sumber daya anggaran, belum adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti pelaksanaan program.

Kata Kunci: *Implementasi, GEMA MADANI SIMPATI, Sadar Inflasi.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi pada pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah pada daerah, melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan efisien, adil dan merata. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri karena antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Hal ini guna mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan dikatakan sebagai masalah sosial yang masih membutuhkan perhatian khusus sehingga membutuhkan banyak waktu dan strategi dalam proses penanganannya. Di Kota Tasikmalaya grafik persentase kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat di kota Tasikmalaya angka persentase kemiskinan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, di tahun 2015 mencapai 16,28 %, tahun 2016 mencapai 16,60 % tahun 2017 mencapai 14,80%, tahun 2018 mencapai 12,71 %, serta tahun 2019 mencapai 11,60%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 12,97 %. Meskipun sempat ada penurunan akan tetapi persentase

kemiskinan di Kota Tasikmalaya tetap menjadi yang tertinggi di Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kota Tasikmalaya terus bergerak dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dengan membangun kemandirian masyarakat guna menuntaskan kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kota Tasikmalaya menyelenggarakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif sebagai model pembangunan berbasis partisipasi di Kota Tasikmalaya. Kebijakan publik dalam pelaksanaan pembangunan yang inovatif sangat diperlukan guna menuntaskan problematika yang selama ini terjadi, melihat dinamika masyarakat yang semakin berkembang dan daya saing yang semakin tinggi.

Program GEMA MADANI SIMPATI sudah ada sejak tahun 2017, yang mana Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 tersebut merupakan perubahan dari peraturan yang sebelumnya mengatur Program Gerakan Masyarakat Berdaya Saing, dan Inovatif. Adanya perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif sebagai model pembangunan berbasis partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat sehingga perlu disempurnakan.

Orang sering beranggapan bahwa tahap implementasi hanya merupakan tahap pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan dan kurang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan. Akan tetapi pada kenyataannya sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam tahap pelaksanaan atau implementasi membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur dan kompeten untuk menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) adalah model pembangunan berbasis partisipasi di Kota Tasikmalaya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program GEMA MADANI SIMPATI memberikan keleluasaan serta ruang gerak kepada masyarakat sebagai

pelaksana teknis untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tingkat Kelurahan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat.

Jenis kegiatan GEMA MADANI SIMPATI yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif sebagai model pembangunan berbasis partisipasi masyarakat meliputi dua tema besar kegiatan yaitu “KESEHATAN PULIH” dan “EKONOMI BANGKIT”. Kegiatan untuk 2 (dua) tema besar tersebut, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menetapkan 1 (satu) kegiatan pada tema “KESEHATAN PULIH” yaitu Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus RT dan RW dalam Tanggap Darurat Covid-19 dan memilih satu jenis kegiatan pada tema “EKONOMI BANGKIT”. Pada tema “EKONOMI BANGKIT” kegiatan yang ada di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Sadar Inflasi. Kegiatan sadar inflasi merupakan kegiatan bercocok tanam tanaman hortikultura, memberdayakan halaman atau pekarangan rumah warga guna mendorong dalam menekan angka inflasi di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, diketahui Implementasi Kebijakan Program

Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya belum optimal. Masalah tersebut diduga disebabkan oleh indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat program GEMA MADANI SIMPATI. Contohnya banyak masyarakat yang belum melaksanakan kegiatan sadar inflasi karena belum mengetahui dan merasakan manfaatnya.
2. Tim Pelaksana Kegiatan kurang mampu menyediakan sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana kurang memadai. Contohnya pada kegiatan sadar inflasi sarana dan prasana pertanian masih kurang seperti embat, belum adanya sarana dan prasarana untuk melindungi tanaman ketika musim hujan sehingga masyarakat mengeluhkan tanaman rusak, serta bibit yang masih terbatas.
3. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga dari 11 RW hanya 4 RW yang mengikuti kegiatan sadar inflasi secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik dipandang sebagai pemanfaatan potensi yang ada sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan, sebagaimana definisi kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (Pasalong, 2017: 46) adalah ‘Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan’.

Proses perumusan kebijakan publik pada umumnya terdiri dari proses analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Biasanya implementasi kebijakan dilakukan setelah perumusan kebijakan. Menurut Barrett (Agustino, 2017: 128) ‘Implementasi kebijakan berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan’. Jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi atau tindakan yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Menurut Hogwood dan Gunn (Nugroho, 2012: 449) mengemukakan bahwa tahapan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama terdiri atas kegiatan-kegiatan
 - a. Menggambarkan suatu rencana program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 - b. Menentukan standar pelaksanaan.
 - c. Menentukan biaya yang akan digunakan serta waktu pelaksanaan.
 2. Tahapan kedua merupakan tahapan pelaksanaan program dengan mendayagunakan staf-staf, sumberdaya, prosedur, biaya serta metode.
 3. Tahapan ketiga terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - a. Menentukan jadwal
 - b. Melakukan pemantauan
 - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.
- Implementasi atau pelaksanaan menurut Tjokroadmudjoyo (2011: 24) “Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai dengan efisien dan ekonomis.” Keberhasilan implementasi kebijakan publik tentunya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Beberapa ahli mengemukakan mengenai variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Metter & Horn (Agustino, 2017: 133) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan itu realistis dengan sosio kultur yang ada di tingkat pelaksana kegiatan.
 2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.
 3. Karakteristik agen pelaksana, kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.
 4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya

kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan sebaliknya.
6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik.

Menurut Gordon (Pasolong, 2017: 68) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu 'Cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi'. Sejalan dengan itu Jones (Agustino, 2017: 154) menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik adalah 'Adanya aktivitas organisasi, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi'. Ketiga

dimensi penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi
Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi yang kompleks, adanya sumber daya yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program, tersedianya perlengkapan alat kerja seperti sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi yaitu menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi dimaksudkan agar program yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjabaran secara detail terkait hal teknis sehingga sasaran dapat memahami prosedur pelaksanaan program.
- c. Aktivitas aplikasi atau penerapan merupakan aktivitas pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan implementator dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, adapun sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebanyak 8 (orang). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari studi literatur dan dokumentasi, studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi, serta triangulasi. Teknik pengolahan/ analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun di dalam proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi, Studi dokumentasi, penulis membatasi membatasi berdasarkan fokus kajian yang disusun merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Jones (Agustino, 2017: 154) yang digunakan dalam implementasi sebuah kebijakan atau program yaitu: aktivitas organisasi, aktivitas interpretasi, serta aktivitas penerapan.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya untuk setiap indikator peneliti sajikan sebagai berikut:

A. Aktivitas Organisasi

a) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Kompeten

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk Program GEMA MADANI SIMPATI di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya khususnya untuk kegiatan sadar inflasi belum optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. SDM yang tersedia untuk program GEMA MADANI SIMPATI di Kelurahan Sukalaksana sudah memadai dan jumlahnya sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi sumber daya manusia yang tersedia belum semua memiliki kompetensi yang bagus. Adapun berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa hambatan-hambatan kompetensi yang dihadapi pelaksana yaitu tidak ada kualifikasi khusus yang diberikan dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan GEMA MADANI SIMPATI. Tersedianya sumber daya manusia yang bersifat kompeten sangatlah berpengaruh terhadap implementasi program GEMA MADANI SIMPATI di Kelurahan Sukalaksana. Menurut Metter & Horn (Agustino, 2017:133) mengatakan bahwa:

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap

tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan sangat sulit diharapkan.

Dengan demikian sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan dalam implementasi sebuah program, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten maka sebuah program atau kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

b) **Adanya Sumber Daya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Pertanian yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sadar inflasi**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa untuk ketersediaan Sumber Daya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Pertanian yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sadar inflasi sudah ada dan cukup membantu masyarakat, namun memang dikarenakan keterbatasan anggaran menyebabkan sarana prasarana yang tersedia belum memadai dan sangat terbatas. Sehingga diperlukan prakarsa masyarakat untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana minimal untuk dirinya sendiri. Dengan demikian Adanya Sumber Daya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Pertanian yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sadar inflasi belum optimal

dapat dilihat dari masih ada hambatan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Edward III (Agustino, 2017:136-141) bahwa 'Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil'.

c) **Adanya Sumber Daya Anggaran yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa untuk ketersediaan Sumber Daya Anggaran yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Program memang sudah tersedia dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, namun memang dana yang tersedia masih terbatas dikarenakan dana tersebut sudah ditetapkan besarnya sehingga sama rata untuk tiap-tiap kelurahan sehingga TPK tidak bisa mengusulkan dana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Untuk itu TPK menggunakan dana yang tersedia dengan seefektif mungkin dari mulai tahap persiapan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian Adanya Sumber Daya Anggaran yang Memadai dalam Mendukung Pelaksanaan Program masih belum optimal dapat dilihat masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam

penyediaan sumber daya anggaran pada kegiatan sadar inflasi.

Hal tersebut belum sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017:134) bahwa salah satu variabel keberhasilan implementasi program adalah sebagai berikut:

Di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau- ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak, maka timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

d) **Adanya Metode Kerjasama yang Dilakukan TPK dalam Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa Metode Kerjasama yang Dilakukan TPK dalam Pelaksanaan Program sudah optimal. Program GEMA MADANI SIMPATI memberikan keleluasaan serta ruang gerak kepada TPK sebagai pelaksana teknis untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini dibuktikan dimana TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) melakukan kerjasama dengan beberapa pihak mulai dengan Pemerintah Kelurahan, organisasi-organisasi yang berhubungan dengan kegiatan sadar inflasi seperti dengan GAPOKTAN,

Kelompok Wanita Tani (KWT), Taruna Tani kemudian dengan Badan Penyuluh Pertanian (BPP), serta dengan RT dan RW.

e) **Adanya Sumber Daya Informasi berupa Laporan Informatif dari Masyarakat Mengenai Kegiatan Kepada TPK**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa sumber daya informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi sebuah program dengan adanya sumber daya informasi berupa laporan informatif dapat memberikan informasi kepada pimpinan dalam hal ini TPK, agar pimpinan mempunyai gambaran terhadap suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga memudahkan dalam penetapan keputusan. Dengan begitu adanya sumber daya informasi berupa laporan informatif dari masyarakat mengenai kegiatan kepada TPK sudah berjalan dengan optimal dengan apa yang dikatakan (Priansa dan Garnida, 2013:210) bahwa “laporan informatif, untuk sekedar memberikan informasi kepada pimpinan mempunyai gambaran mengenai suatu kegiatan”.

B. Aktivitas Interpretasi

a) **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Melakukan Sosialisasi Maksud dan Tujuan Program yang akan Dilaksanakan Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa sosialisasi sangat penting dalam

implementasi sebuah program dimana dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa mengetahui program yang akan dilaksanakan, tujuannya program itu apa, dan pelaksanaannya bagaimana. Dengan begitu pada indikator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan sosialisasi maksud dan tujuan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat belum optimal dikarenakan TPK hanya melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat saja sehingga pendistribusiannya tidak merata. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Agustino(2017: 161) bahwa “Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikannya, tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai”.

b) Adanya Sistem Penjadwalan dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dengan adanya sistem penjadwalan yang sistematis akan mempermudah pelaksanaan program. Untuk itu adanya sistem penjadwalan dalam pelaksanaan program sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020, meskipun tidak ada jadwal spesifik untuk masyarakat seperti jadwal penanaman dan lainnya yang berhubungan dengan penanaman tanaman hortikultura tidak menyulitkan

masyarakat karena masyarakat juga dalam melaksanakan kegiatannya tersebut menyesuaikan dengan faktor-faktor lain seperti kesibukan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dalam prakteknya dilakukan secara fleksibel tetapi tetap menghasilkan sebuah manfaat bagi masyarakat yang mengikutinya.

c) Adanya Sanksi bagi Masyarakat yang tidak Ikut Serta dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa sanksi untuk masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan program sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dikarenakan masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut merasa tidak dirugikan. Dengan begitu untuk indikator Adanya Sanksi bagi Masyarakat yang tidak Ikut Serta dalam Pelaksanaan Program belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh agustino dimana tidak adanya sanksi untuk masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan sadar inflasi, orang akan menjalankan atau mengikuti suatu kebijakan karena takut terkena sanksi hukum.

C. Aktivitas Penerapan atau Aplikasi

a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pendampingan Langsung Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa

dengan adanya pendampingan sangat memudahkan masyarakat dalam praktek di lapangan, masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembinaan seperti bagaimana cara pembibitan, penanaman, serta bagaimana cara memberantas hama untuk penanaman tanaman hortikultura. Dengan begitu untuk indikator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pendampingan Langsung Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan Program sudah berjalan dengan optimal. Seperti halnya mendatangkan orang yang kompeten pada kegiatan sadar inflasi.

b) **Tim Pelaksana Kegiatan memberikan Motivasi atau Dorongan Kepada Masyarakat dalam Meningkatkan Swadaya**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dengan memberikan motivasi masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi lebih seperti menyediakan dana pendamping. Motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangkan orang ahli, memberitahu masyarakat manfaat dari program tersebut. Dengan begitu untuk indikator Tim Pelaksana Kegiatan memberikan Motivasi atau Dorongan Kepada Masyarakat dalam Meningkatkan Swadaya sudah berjalan dengan optimal. Dimana setidaknya ada usaha yang dilakukan oleh TPK dan masyarakat untuk saling memberikan motivasi dan semangat contohnya banyak masyarakat yang termotivasi setelah melihat ke RW an

lain yang dijadikan percontohan pada kegiatan sadar inflasi.

c) **Tim Pelaksana Kegiatan Melakukan Pengawasan Secara Rutin Kepada Masyarakat Secara Langsung**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa dengan adanya pengawasan secara rutin TPK ataupun Pemerintah Kelurahan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan sadar inflasi tersebut apakah sudah berjalan ataukah ada hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga dapat mengetahui masyarakat mana saja yang sudah mengikuti atau yang belum mengikuti kegiatan sadar inflasi. Dengan begitu untuk indikator Tim Pelaksana Kegiatan Melakukan Pengawasan Secara Rutin Kepada Masyarakat Secara Langsung belum berjalan optimal hal ini terlihat dari belum semua masyarakat mendapat pengawasan dari TPK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI SIMPATI) oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Inovatif secara umum telah dilakukan dengan optimal oleh Tim

Pelaksana Kegiatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O' Jones (Agustino, 2017: 154) mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal diantaranya, tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, adanya sumber daya fasilitas (sarana dan prasarana) pertanian yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sadar inflasi, adanya sumber daya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan sosialisasi maksud dan tujuan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, serta untuk indikator Tim Pelaksana Kegiatan melakukan pengawasan secara rutin kepada masyarakat secara langsung.

Untuk mengatasi hambatan–hambatan yang dihadapi Tim Pelaksana Kegiatan melakukan upaya-upaya seperti Melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan, serta *sharing personal*, sehingga membantu Tim Pelaksana Kegiatan untuk memahami pencapaian tujuan kebijakan, dan dapat meningkatkan kompetensi Tim Pelaksana kegiatan, adanya prakarsa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian yang kurang dengan modal sendiri, kemudian dengan mendaur ulang sampah sehingga menjadi barang yang memiliki nilai guna, menggunakan dana dari partisipasi masyarakat, meningkatkan

kekompakan tim dalam proses pengelolaan anggaran sehingga anggaran digunakan seefektif mungkin, menghimbau masyarakat yang menjadi perwakilan dalam sosialisasi yang telah dilakukan supaya melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat yang ada di wilayahnya. peningkatan sikap profesional dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, lebih banyak berdiskusi sehingga dapat mengevaluasi setiap kegiatan dan memudahkan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adisasmita, Tjokroadmudjoyo. 2011. *Pengelelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo.2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Donni, Juni Priansa dan Agus Garnida. 2012. *Manajemen perkantoran*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Rian.2012. *Public policy*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Pasolong, Harbani.2017.*Teori administrasipublik*.Bandung:Alfabeta.
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri,

Berdaya Saing, dan Inovatif
Sebagai Model Pembangunan
Berbasis Partisipasi
Masyarakat.

Sugiyono. 2019. *Metode penelitian
kuantitatif, kualitatif R&D.*
Bandung: Alfabeta

Silalahi, Ulber.2012. *Metode penelitian
sosial.* Bandung:Refika
Aditama.